

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan maupun keamanan. Dibalik itu semua ternyata masih ada juga masyarakat yang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan terjadi terutama pada masyarakat yang berada dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti masyarakat masyarakat yang memang mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Sedangkan penghasilan sebagai petani itu pun kadang-kadang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, karena mereka bekerja hanya bergantung pada situasi alam dan penghasilan setiap harinya tidak menentu. Apabila situasi alam memungkinkan untuk bercocok tanam maka mereka akan menanam tanaman yang bisa saja asal akan memberikan hasil untuk kehidupan mereka, dan apabila situasi alam tidak memungkinkan maka mereka menunda untuk melakukan kegiatan bercocok tanam (Sedarmayanti, 1999 : 79).

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata (Wikipedia, 2013 : 45).

Program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya, dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut (Edi Suharto, 2004 : 37).

Persepsi dari bahasa Latin *perceptio, percipio* adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memeberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, Pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran (Slameto, 2010:102).

Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang di inderakan. (Robbins, 2003:97).

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu (Purwodarminto, 1990: 759).

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*". Konsep empowerment digunakan sebagai alternatif terhadap konsep-konsep pembangunan yang selama ini dianggap tidak berhasil memberikan jawaban memuaskan terhadap masalah-masalah besar pembangunan, khususnya masalah kekuasaan (power) dan ketimpangan (inequity). Kata power dalam empowerment diartikan "daya", sehingga empowerment diartikan sebagai pemberdayaan. Daya dalam arti kekuatan berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Keadaan keterbelakangan yang terjadi disebabkan karena ketidakseimbangan dalam kepemilikan atau akses pada sumber-sumber daya (Wikipedia, 1999 : 20).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Mubiyarto, 1998 : 56).

Menurut Roucek (1986 : 83-84), Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama dimana mereka berdiam pada daerah yang sama, yang sebagian besar atau seluruh warganya memperhatikan adat-adat kebiasaan dan aktifitas yang sama pula.

Selanjutnya dikatakan bahwa apabila dalam suatu daerah/wilayah tertentu terdapat manusia yang hidup lebih dari satu orang atau lebih maka dapat dikatakan terbentuk suatu masyarakat (Soekanto, 1985 : 37). Soekanto (1994:32), mengemukakan ciri masyarakat yaitu manusia yang hidup bersatu, bercampur untuk waktu yang lama mereka sadar bahwa mereka mempunyai satu kesatuan, serta merupakan suatu sistem hidup bersama.

Kelembagaan adalah keseluruhan pola- pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984 : 27 - 39).

Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dan relasi sosial yg melibatkan orang, memiliki tujuan tertentu, memiliki norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan mengandung dua aspek yakni ”aspek kultural” dan ”aspek struktural”. Aspek kultural terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan “jiwa” suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain Sementara, aspek struktural lebih statis, yang berisi struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar bagian, struktur umum, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, profil, kekuasaan, dan lain-lain (Muhamad, 1998 : 25).

Provinsi Gorontalo memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan juga sumberdaya manusia yang cukup potensial untuk di kembangkan. Hal ini dapat menjadi prioritas pengembangan yang di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka program PNPM prioritas pengembangan di proyeksikan pada pengembangan usaha dengan melibatkan masyarakat.

Kecamatan marisa termasuk kecamatan yang masuk dalam program PNPM. Kecamatan Marisa memiliki delapan desa, diantara kedelapan desa tersebut desa teratai salah satu yang termasuk menjalankan program PNPM, karna lapisan masyarakat yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun supir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup sendiri. Dengan adanya program PNPM mandiri ini masyarakat dapat menjadi pribadi yang mengerti akan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari khususnya dalam pembangunan kemajuan ekonomi.

Adapun permasalahan yang terdapat pada program PNPM di Desa Teratai yaitu, masyarakat yang termasuk dalam program PNPM masi dalam tahap pelatihan, tempat atau lokasi pelaksanaan untuk menjalankan program belum terfasilitasi dengan maksimal, serta minimnya perhatian pemerintah dalam mengalokasikan tempat khusus pelatihan masyarakat yang termasuk dalam program PNPM. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat untuk pentingnya program PNPM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Penerapan Program PNPM Mandiri Berbasis Kelembagaan Petani Ikan Air Tawar Di Desa Teratai Kabupaten Pohuwato ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui Penerapan Program PNPM Mandiri Berbasis Kelembagaan Petani Ikan Air Tawar Di Desa Teratai Kabupaten Pohuwato.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis dalam penelitian, sekaligus memperkaya hasana ilmu yang sedang di tekuni.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya menyangkut Persepsi Masyarakat Terhadap Program PNPM Mandiri.
3. Kepada masyarakat untuk lebih memahami pentingnya Program PNPM.